

Dinamika Ekonomi Surabaya Raya: Studi tentang Dampak PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan

¹Naflah Azmi Nur Aisyah, ²Sishadiyati

¹² Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹naflahazminuraisyah@gmail.com

ABSTRACT

Based on data and publications published by the BPS, it is known that the Greater Surabaya area has a per capita GDP above the average per capita GDP of East Java, but the Gini Index value still shows a high position. This study evaluates the influence of per capita GDP, poverty rate, and minimum wage on income inequality in Greater Surabaya, utilizing secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) for the period 2013-2023. The results show that Greater Surabaya has a higher GRDP per capita than the East Java average but records the highest Gini Index in Indonesia, signaling significant inequality. Analysis using the Common Effect Model panel data regression model reveals that the three variables simultaneously have a significant influence on income inequality. Specifically, GRDP per capita contributes positively to inequality, indicated by the significant difference between the industrial and service sectors compared to the low-wage sector. Meanwhile, poverty rate and minimum wage both affect inequality negatively, suggesting that effective income redistribution efforts and minimum wage increase policies by the government play a role in reducing income disparity.

Keywords: Income Inequality¹, GRDP per capita², Poverty rate³, Minimum wage⁴

ABSTRAK

Berdasarkan data serta publikasi yang diterbitkan bps diketahui bahwa wilayah Surabaya Raya memiliki jumlah pdrb perkapita diatas rata-rata pdrb perkapita Jawa Timur, namun angka nilai indeks gini masih menunjukka posisi yang tinggi. studi ini mengevaluasi pengaruh PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya, memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2013-2023. Hasilnya menunjukkan bahwa Surabaya Raya memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur namun mencatat Indeks Gini tertinggi di Indonesia, menandakan ketimpangan yang signifikan. Analisis menggunakan model regresi data panel Common Effect Model mengungkapkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara spesifik, PDRB per kapita berkontribusi positif terhadap ketimpangan, diindikasikan oleh perbedaan yang signifikan antara sektor industri dan jasa dibandingkan dengan sektor dengan upah rendah. Sementara itu, tingkat kemiskinan dan upah minimum keduanya mempengaruhi ketimpangan secara negatif, menunjukkan adanya upaya redistribusi pendapatan yang efektif dan kebijakan peningkatan upah minimum oleh pemerintah, yang berperan dalam meredam disparitas pendapatan.

Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan¹, PDRB perkapita², Tingkat kemiskinan³, Upah Minimum⁴

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan isu penting yang mendapat perhatian besar dalam kajian ekonomi dan pembangunan. Selain itu, proses pembangunan merupakan aktivitas yang perlu dilakukan oleh beragam negara seperti Indonesia yang sangat memperhatikan kesejahteraan perekonomiannya. Akan tetapi, terdapat dilema di mana dalam usaha mencapai kesejahteraan tersebut, sering kali pemerintah lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan isu kesenjangan ekonomi. Hal ini tergambar dalam teori yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1995. Menurutnya, ada sebuah fenomena yang disebut dengan hipotesis kurva U terbalik,

yang mengilustrasikan bahwa di awal pembangunan, distribusi pendapatan akan cenderung menjadi tidak merata. Namun, seiring berjalannya waktu dan pembangunan mencapai tingkat tertentu, distribusi pendapatan diharapkan akan menjadi lebih merata (Yoertiara & Feriyanto, 2022)

Perhitungan untuk melihat ketimpangan ini dilakukan peneliti dengan indikator gini ratio dan termasuk indikator yang sering digunakan untuk menilai sejauh mana pendapatan didistribusikan secara merata di antara populasi (BPS Yogyakarta, 2020). Koefisien Gini memiliki rentang dari 0 sampai 1. Sebuah nilai 0 menandakan distribusi yang ideal di mana semua individu memiliki porsi yang sama, sedangkan nilai 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang ekstrem, di mana semua kekayaan dikonsentrasikan pada satu individu dan yang lainnya tidak memperoleh apa pun.

Tabel 1 Gini Rasio Surabaya Raya

Tahun	Kabupaten/Kota		
	Kabupaten Gresik	Kota Surabaya	Kabupaten Sidoarjo
2013	0.36	0.37	0.30
2014	0.28	0.39	0.30
2015	0.31	0.42	0.35
2016	0.33	0.39	0.37
2017	0.29	0.39	0.34
2018	0.27	0.36	0.35
2019	0.28	0.41	0.31
2020	0.30	0.34	0.34
2021	0.31	0.35	0.35
2022	0.36	0.39	0.37
2023	0.33	0.42	0.36

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel di atas menampilkan data koefisien Gini dari tahun 2013 hingga 2023 untuk tiga wilayah di Surabaya Raya, yaitu Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa Kota Surabaya secara konsisten memiliki koefisien Gini yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua wilayah lainnya, menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi di kota tersebut. Pada tahun 2015, Kota Surabaya mencapai puncak ketimpangan dengan koefisien Gini sebesar 0.42. Sementara itu, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan fluktuasi dalam nilai Gini mereka, tetapi umumnya memiliki koefisien lebih rendah dibandingkan dengan Kota Surabaya.

Untuk mendalami dampak dari variabel ekonomi tertentu terhadap ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya, penelitian ini juga mengkaji pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum. Sebuah peningkatan dalam PDRB per kapita merupakan indikator penting yang mencerminkan tingkat kemakmuran ekonomi per individu di suatu daerah dan memiliki korelasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Di satu sisi, tingkat kemiskinan secara langsung mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena menjadi gambaran proporsi masyarakat yang kondisinya ada di bawah garis kemiskinan, dimana kondisi ini merupakan ilustrasi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali menandakan bahwa sebagian besar penduduk belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi, yang bisa memperlebar kesenjangan pendapatan.

Sementara itu, upah minimum sebagai kebijakan pemerintah juga memiliki peran signifikan dalam menentukan daya beli pekerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan menetapkan batas bawah pendapatan bagi pekerja, upah minimum dapat

mencegah pekerja bergaji rendah jatuh ke dalam kemiskinan lebih lanjut, sambil mencoba mengurangi disparitas pendapatan yang tajam antara berbagai lapisan pekerja. Penelitian oleh Anshari et al., (2018) menemukan bahwa kenaikan upah minimum secara signifikan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan di Indonesia. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Nilasari & Amelia (2022) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengindikasikan bahwa tingkat PDRB per kapita berperan signifikan dalam menentukan ketidaksetaraan pendapatan. Studi lain oleh Farhan & Sugianto (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan adalah faktor dominan yang mempengaruhi disparitas pendapatan di Pulau Jawa.

Meskipun terdapat banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang ketimpangan pendapatan. Namun, ada beberapa perbedaan yang ditekankan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu yaitu periode waktu yang digunakan dalam studi ini yang mencakup sebelas tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga 2023, yang lebih representatif untuk menggambarkan kondisi terkini pada tahun 2022 dan 2023, dibandingkan dengan studi lain yang umumnya menggunakan data selama enam tahun. Selain itu, juga berbeda pada lokasi penelitian yaitu di Surabaya Raya. Keterkaitan atau hubungan antara studi ini dan penelitian terdahulu terletak dalam metode penelitian ini, termasuk penggunaan analisis regresi data panel. Variabel yang sering digunakan dalam studi sebelumnya termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum yang sama, yang memungkinkan penelitian ini untuk dijadikan referensi komparatif bagi peneliti dalam mengevaluasi dan mendukung hasil penelitian .

LANDASAN TEORI

Ketimpangan Pendapatan

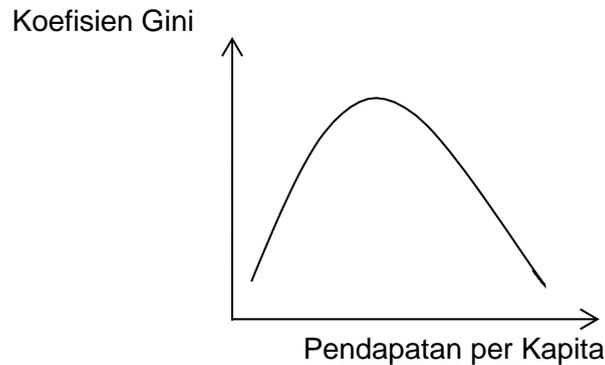
Teori ketimpangan pendapatan yang dihipotesiskan oleh Simon Kuznets pada tahun 1995, dikenal sebagai Hipotesis U-Terbalik, menggambarkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, biasanya terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang belum merata. Seiring berjalannya waktu, di tahap berikutnya, ketimpangan ini diharapkan akan menurun. Fenomena ini sering terjadi di negara-negara berkembang di mana daerah yang lebih maju dapat memanfaatkan peluang pembangunan dengan lebih baik dibandingkan dengan daerah yang tertinggal, yang seringkali terhambat oleh infrastruktur yang kurang memadai dan kualitas sumber daya manusia yang lebih rendah (Farhan & Sugianto, 2022).

Dalam kajian Todaro & Smith (2020) ketimpangan pendapatan dijelaskan sebagai disparitas dalam distribusi pendapatan yang menghasilkan perbedaan mencolok antar kelompok masyarakat, sedangkan Baldwin dalam (Nilasari & Amelia, 2022) mendefinisikannya sebagai variasi dalam kesejahteraan dan pendapatan antara individu dengan penghasilan tinggi dan rendah dalam ekonomi. Secara umum, ketimpangan pendapatan mencerminkan adanya ketimpangan dari perolehan jumlah pendapatan yang berbeda di kelompok masyarakat suatu wilayah, menimbulkan disparitas penghasilan yang signifikan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Untuk mengukur fenomena ini, beberapa metode seperti Kurva U-Terbalik Kuznets, Indeks Gini, dan Kurva Lorenz sering digunakan.

Teori Kuznet

Hipotesis Kuznets menggambarkan relasi antara PDRB per kapita dan ketimpangan distribusi pendapatan di antara penduduk sebuah negara, yang diilustrasikan melalui kurva berbentuk U terbalik. Menurut teori Kuznets sebagaimana dikutip dalam Zulfariska & Bariyah, (2021), menjelaskan bahwa di awal proses pertumbuhan terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang kian meninggi, kemudian akan menurun di tahap tertentu. Berikut adalah kurva U yang merupakan hipotesis dari teori Kuznet. Disparitas distribusi pendapatan cenderung meningkat pada fase awal pertumbuhan ekonomi. Namun, ketimpangan tersebut akan mulai berkurang setelah mencapai fase pertumbuhan tertentu. Ini disimbolkan melalui kurva U, yang merupakan

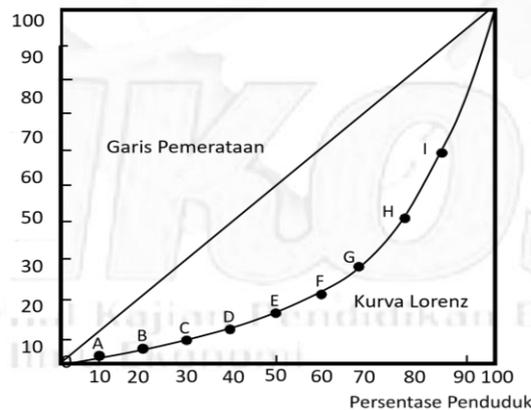
representasi visual dari hipotesis teori Kuznets (Sholikah & Imaningsih, 2022).



Gambar 1 Grafik Kurva Kuznet
 Sumber : Todaro & Smith, 2020

Kurva Lorenz dan Indeks Gini

Kurva Lorenz adalah grafik yang menggambarkan distribusi pendapatan di antara populasi dalam sebuah wilayah (Todaro & Smith, 2020). Kurva ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pendapatan dibagi di antara berbagai kelompok penduduk, dan juga berguna sebagai alat ukur untuk menentukan apakah distribusi pendapatan di suatu wilayah cenderung merata atau tidak. Dalam representasi grafis kurva Lorenz, sumbu horizontal menggambarkan kondisi kumulatif dari presentase populasi, lalu sumbu vertical menggambarkan secara kumulatif presentase pendapatan yang mana diterima populasi. Area di bawah kurva, yang dikenal sebagai daerah dibawah garis pernyataan, mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan; luasnya area dibawah garis pemerataan mengindikasikan tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Kurva Lorenz dapat diilustrasikan melalui gambar berikut untuk lebih menjelaskan distribusi pendapatan tersebut :



Gambar 2 Hipotesis Kuznet
 Sumber : Todaro & Smith, 2020

Indeks Gini, sebuah metode yang dirancang untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu wilayah, dikembangkan oleh ilmuwan Italia, Corrado Gini, dan pertama kali dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya "Variabilità e mutabilità". Menurut Todaro dan Smith dalam (BPS, 2021), koefisien Gini digunakan sebagai alat untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan di suatu daerah. Indeks ini berfungsi sebagai indikator kuantitatif yang efektif dalam memvisualisasikan distribusi pendapatan dan membantu dalam analisis ekonomi regional. Nilai Indeks Gini

berkisar antara 0 hingga 1, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan dalam suatu wilayah. Sebuah nilai yang mendekati 0 menunjukkan bahwa pendapatan didistribusikan secara merata di antara penduduk, mengindikasikan bahwa setiap individu di daerah tersebut memiliki pendapatan yang relatif sama. Sebaliknya, nilai yang mendekati 1 menandakan adanya ketimpangan yang signifikan, dimana pendapatan terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut skala penilaian, nilai Indeks Gini kurang dari 0,4 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang rendah, nilai antara 0,4 hingga 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan yang moderat, sedangkan nilai di atas 0,5 menandakan tingkat ketimpangan yang tinggi (Sholikah & Imaningsih, 2022).

Produk Domestic Regional Bruto perkapita

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh semua kegiatan bisnis dalam suatu wilayah, serta total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi daerah tersebut (BPS Yogyakarta, 2020). PDRB per kapita, yang dihitung dengan membagi total PDRB suatu wilayah dengan jumlah penduduknya, dianggap sebagai indikator krusial untuk mengukur kesejahteraan ekonomi wilayah dalam periode tertentu. Ini memberikan gambaran mendetail tentang kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan baik dalam bentuk barang maupun jasa, dan menjadi alat penting dalam proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi kinerja ekonomi suatu wilayah. Pengertian mendalam tentang PDRB per kapita membantu dalam memahami kondisi ekonomi penduduk serta mengidentifikasi potensi pertumbuhan ekonomi regional (Logaritma, 2020). Sementara itu, pendapatan per kapita mengacu pada total pendapatan bruto nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk, memberikan perspektif lain dalam menilai kondisi ekonomi (Todaro & Smith, 2020).

Tingkat Kemiskinan

Teori Neo-Liberal, mendefinisikan kemiskinan sebagai kemiskinan absolut, yang diukur berdasarkan ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka sendiri (Susanto & Pangesti, 2019). Dalam konteks ini, proporsi atau persentase orang-orang dalam suatu populasi yang hidup di rumah tangga dengan pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan diklasifikasikan sebagai tingkat kemiskinan (Mankiw, 2023). Pemerintah secara rutin menetapkan dan menyesuaikan garis kemiskinan setiap tahun untuk mencerminkan perubahan harga dan beradaptasi dengan kondisi ukuran keluarga yang beragam.

Menurut Todaro & Smith (2020), individu yang dikategorikan miskin sering kali memiliki pendidikan yang rendah, gizi dan kesehatan yang buruk, tinggal di lingkungan yang kurang mendukung, dan memiliki pendapatan yang rendah. World Bank menegaskan bahwa kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia menentukan tingkat kesejahteraan, yang umumnya diukur melalui pendapatan. Secara umum, kemiskinan juga sering dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Upah Minimum

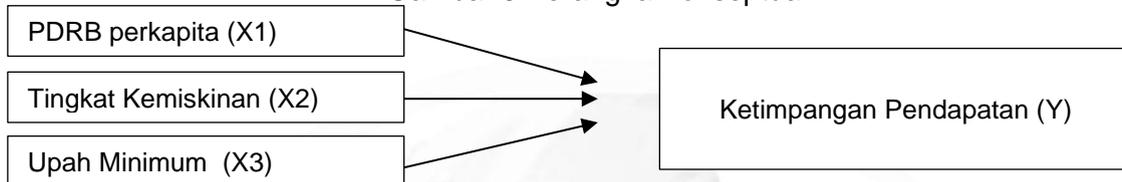
Upah minimum diartikan sebagai standar terendah dari kompensasi yang diterima pekerja untuk jasa mereka dalam suatu sektor pekerjaan, yang sering dijadikan referensi oleh pemilik bisnis dalam membayar karyawan mereka. Tingkat upah minimum berbeda di setiap wilayah, mencerminkan standar hidup minimum yang termasuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pakaian, pangan, dan efisiensi kerja. Di Indonesia, kebijakan upah minimum diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, yang bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh dari penurunan upah ke tingkat paling rendah akibat ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini memerlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk

mendukung keberlanjutan bisnis serta meningkatkan kesejahteraan pekerja. Implementasi kebijakan upah minimum oleh pemerintah daerah menjadi aspek krusial, mengingat tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diungkapkan oleh Sumarsono dalam (Fashuri & Saputra, 2022)

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merujuk pada pembahasan disini yakni PDRB perkapita (X1), tingkat kemiskinan (X2), serta upah minimum (X3) kepada IPM (Y). Hal tersebut selanjutnya akan dijelaskan seperti di bawah ini :

Gambar 3 Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan pemaparan baik landasan teori maupun latar belakang di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yakni:

1. PDRB perkapita berpengaruh kepada ketimpangan pendapatan
2. Tingkat Kemiskinan berpengaruh kepada ketimpangan pendapatan
3. Upah Minimum berpengaruh kepada ketimpangan pendapatan

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat asosiatif, mengkaji hubungan antar variabel yang diteliti melalui pendekatan deskriptif kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis. Populasi dalam penelitian ini meliputi serangkaian data time series dari tahun 2013 hingga 2023, dan melibatkan tiga kabupaten/kota di Surabaya Raya sebagai cross section. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, di mana penulis menentukan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga lainnya yang relevan di wilayah Surabaya Raya. Dalam penelitian ini, indeks Gini digunakan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan dan dijadikan variabel terikat. Adapun variabel bebas yang dihipotesiskan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Surabaya Raya meliputi PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel melalui aplikasi EViews 13, dengan memilih Common Effect Model (CEM) sebagai model analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Pemilihan model

Model analisis panel data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan uji dibawah ini Model analisis panel data yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan uji dibawah ini:

Uji Chow

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk mengevaluasi dan memilih model yang lebih tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section F	1.468164	(2,27)	0.2479
Cross-section Chi-square	3.408989	2	0.1819

Sumber: Data Diolah, 2024

Ditinjau dari Tabel 2, Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas untuk uji Cross-section F dan Chi-square masing-masing adalah 0.2479 dan 0.1819, yang keduanya lebih besar dari nilai alpha 0.05. Hal ini mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis alternatif dan mendukung penggunaan Common Effect Model sebagai metode yang paling sesuai. Hasil Uji Chow mengarahkan analisis lebih lanjut menggunakan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Common Effect Model (CEM) diidentifikasi sebagai model yang paling sesuai dan efektif untuk digunakan dalam penelitian ini. Konsistensi hasil yang ditunjukkan oleh CEM mengeliminasi kebutuhan untuk melaksanakan Uji Hausman, yang umumnya digunakan untuk membandingkan antara Common Effect Model dengan Random Effect Model, karena CEM telah terbukti sebagai pilihan model yang optimal berdasarkan analisis yang dilakukan.

Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menilai dan memilih model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*.

Tabel 3 Uji Lagrange Multiplier

Nul Alternative	Test Hypothesis Cross-Section	Time	Both
Breusch-Pagan	1.571927 (0.2099)	0.196047 (0.6579)	1.767974 (0.1836)

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 3, Uji *Lagrange Multiplier* menghasilkan nilai cross-section Breusch pagan sebesar 0,2099, yang menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Hal ini mengindikasikan penerimaan hipotesis nol (H_0), yang berarti bahwa metode estimasi yang terbaik adalah *Common Effect Model*. Hasil ini didapatkan melalui serangkaian uji spesifikasi model, termasuk uji Chow dan Lagrange Multiplier, yang menunjukkan bahwa model regresi yang paling tepat adalah *Common Effect Model*.

Dalam literatur ekonomi, diakui bahwa dalam menggunakan data panel untuk analisis regresi, tidak semua tes asumsi klasik yang diperlukan dalam metode Ordinary Least Squares (OLS) harus dilakukan. Contohnya, ketika menerapkan Common Effect Model dalam analisis regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dianggap perlu. Struktur data panel yang memungkinkan variasi antar waktu dan individu menjadikan beberapa asumsi klasik OLS tidak selalu relevan, seperti yang didukung oleh Basuki (2021) dalam hasil uji tersebut.

Uji Multikolinieritas

Dalam rangka menelaah eksistensi gejala multikolinearitas yaitu melalui eksistensi korelasi setiap variabel ini bebas atau independen maka diambil keputusan berdasarkan nilai VIF melalui hasil analisis regresi. Berikut ini hasil pengujian analisis regresi:

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

	LN_PDRB per Kapita	Tingkat Kemiskinan	LN_Upah Minimum
LN_PDRB per Kapita	1.000000	-0.454796	0.541504
Tingkat Kemiskinan	-0.454796	1.000000	-0.171563
LN_Upah Minimum	0.541504	-0.171563	1.000000

Sumber: Data Diolah, 2024

Pada hasil pengujian regresi linier dapat dilihat bahwa seluruh variabel independen (PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum) dalam model regresi ini

memenuhi ketentuan di mana nilai korelasi antar variabel <0,8 sehingga kesimpulannya yakni model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Ketentuan	Keterangan
PDRB PK	0.8599	≥0.05	Tak Terjadi Heteroskedasitas
TKSMKN	0.6323	≥0.05	Tak Terjadi Heteroskedasitas
UM	0.1692	≥0.05	Tak Terjadi Heteroskedasitas

Sumber: Data Diolah, 2024

Perolehan uji pada variabel terikat ketimpangan pendapatan seluruh residual mempunyai nilai yang melebihi 0,05 sehingga antara variabel dan juga nilai residual yang memaparkan tidak memiliki kekorrelasi hingga pada persamaan penelitian ini tak mengalami heteroskedasitisitas. Setelah itu dilanjutkan dengan hasil regresi model common effect:

Hasil Regresi *Common Effect Model*

Tabel 6 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel *Common Effect*

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/15/24 Time: 19:47
 Sample: 2013 2023
 Periods included: 11
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 33

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.124330	0.295997	-0.420039	0.6776
LN_PDRBPK	0.059894	0.016547	3.619703	0.0011
TKMSKN	-0.005118	0.001633	-3.134278	0.0039
LN_UM	-0.040005	0.019455	-2.056252	0.0489
R-squared	0.586533	Mean dependent var		0.345152
Adjusted R-squared	0.543760	S.D. dependent var		0.041012
S.E. of regression	0.027702	Akaike info criterion		-4.221414
Sum squared resid	0.022255	Schwarz criterion		-4.040019
Log likelihood	73.65333	Hannan-Quinn criter.		-4.160380
F-statistic	13.71284	Durbin-Watson stat		1.590717
Prob(F-statistic)	0.000009			

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi pada Gambar maka didapat persamaan regresi linier berganda model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,00298 + 0,05989 \text{ PDRBPK} - 0,00511 \text{ TKMSKN} - 0,04000 \text{ UM}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

- Konstanta a sebesar 0,00298 menyatakan jika nilai PDRB perkapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum adalah (0) maka nilai variabel ketimpangan pendapatan adalah sebesar 0,00298

- b. Nilai koefisien regresi X_1 memiliki hubungan positif 0,05989, artinya setiap perubahan 1% PDRB perkapita maka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,05989.
- c. Nilai koefisien regresi X_2 memiliki hubungan negatif -0,00511, artinya setiap perubahan 1% Tingkat kemiskinan maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar -0,00511.
- d. Nilai koefisien regresi X_2 memiliki hubungan negatif -0,04000, artinya setiap perubahan 1% Upah minimum maka ketimpangan pendapatan mengalami penurunan sebesar -0,04000.

Diskusi selanjutnya akan mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam Tabel 2, nilai R-squared (R^2) yang diperoleh adalah 0,58. Ini menunjukkan bahwa 58% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model, sedangkan sisanya 42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Lebih lanjut, analisis ini juga mengkaji pengaruh bersama dari PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan, yang ditunjukkan melalui nilai F- statistic sebesar 13.71284 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000009. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini dilakukan dengan mengamati nilai signifikansi individu dari setiap variabel independen. Variabel PDRB per kapita, dengan nilai signifikansi 0,0011, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang berarti hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal serupa juga berlaku untuk variabel tingkat kemiskinan, yang memiliki nilai signifikansi 0,0013, menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan mengarah pada penolakan H_0 . Terakhir, upah minimum dengan nilai signifikansi 0,0489 juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang mengarah pada penolakan H_0 . Dengan demikian, analisis ini memberikan bukti yang kuat bahwa ketiga variabel independen mempengaruhi ketimpangan pendapatan secara signifikan secara individu.

Pembahasan

Pengaruh PDRB perkapita Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya

Dari hasil analisis menghasilkan dimana variabel PDRB perkapita berdampak positif kepada ketimpangan pendapatan pada Surabaya Raya di tahun 2013 hingga 2023 sebab Di wilayah Jawa Timur, khususnya di Gresik, Surabaya, dan Sidoarjo, terdapat kecenderungan yang menonjol terkait dengan perkembangan yang lebih dinamis dalam sektor industri dan jasa dibandingkan dengan sektor pertanian. Sebagai pusat ekonomi dan bisnis utama, kawasan ini menarik sejumlah besar investasi serta kehadiran perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor industri dan jasa. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor-sektor ini cenderung lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga individu yang bekerja dalam sektor ini seringkali mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Sementara itu, kelompok lain yang pekerjaannya bergantung pada sektor dengan tingkat upah yang lebih rendah, seperti pertanian, cenderung tertinggal. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan pendapatan yang semakin lebar di wilayah ini.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya

Sesuai hasil analisis menghasilkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berdampak negatif serta signifikan kepada ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya tahun 2013-2023, hal dikarenakan tingkat kemiskinan telah mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan redistribusi pendapatan yang lebih kuat, termasuk peningkatan bantuan sosial dan subsidi untuk rumah tangga miskin, yang efektif dalam mengurangi disparitas pendapatan secara keseluruhan. Kebijakan ini, yang didukung oleh

peningkatan kesadaran publik terhadap kesenjangan ekonomi, telah menghasilkan dukungan yang lebih luas terhadap inisiatif redistribusi. Akibatnya, pemerintah memperkenalkan strategi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan lebih efektif, menjadikan peningkatan kemiskinan sebagai perubahan untuk reformasi sosial dan ekonomi yang lebih cepat. Selain itu, perubahan dalam struktur pekerjaan khususnya penurunan pekerjaan sektor informal yang kurang stabil dan terlindungi telah menyebabkan transisi pekerja ke sektor formal dengan upah yang lebih tinggi dan stabil, yang pada gilirannya membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah pekerja di sektor informal di Surabaya Raya dari 41,7 persen pada tahun 2011 menjadi 38 persen pada tahun 2023, permasalahan ini menyebabkan adanya tingkat kemiskinan berdampak negatif kepada ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya tahun 2013-2023.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Surabaya Raya

Dari hasil analisis menghasilkan bahwa variable upah minimum berdampak negatif serta signifikan kepada ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya tahun 2013-2023, keadaan tersebut disebabkan oleh Inisiatif pemerintah dalam meningkatkan upah minimum telah berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Lebih lanjut, Surabaya Raya telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja, yang diharapkan dapat memperbaiki akses terhadap peluang kerja dengan potensi pendapatan yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut mampu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Surabaya Raya. Upaya pemerintah ini dibuktikan dengan wilayah Surabaya Raya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo memiliki upah minimum tertinggi di provinsi tersebut, sebesar Rp 4.525.479, Rp 4.522.030, dan Rp 4.518.582 .

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil analisis secara parsial pada variabel PDRB perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; 2) Hasil analisis secara parsial pada variabel Tingkat kemiskinan dan upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; 3) Hasil analisis secara simultan pada variabel PDRB perkapita, Tingkat kemiskinan dan upah minimum secara simultan (Bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diberikan untuk berbagai pihak: : 1) masyarakat harus memfokuskan upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan agar pencapaian pendapatan yang merata dapat terwujud di semua lapisan. Lebih lanjut, sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga peningkatan pendapatan ini dapat berjalan paralel dengan upaya pemerataan pendapatan. 2) diharapkan agar pemerintah dapat memfasilitasi dan mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya di daerah yang sudah berkembang tetapi juga merata ke seluruh golongan dan wilayah, dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Ini diharapkan akan memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 3) untuk para peneliti di masa mendatang, disarankan untuk memperluas kerangka penelitian dengan memasukkan variabel independen tambahan seperti PDRB perkapita, Tingkat kemiskinan, dan upah minimum, yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika ekonomi regional dan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2018). ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SELURUH PROVINSI DI INDONESIA. *Jurnal Ecogen*, 1(3), 494. <https://doi.org/https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v10i2.26>
- (BPS), B. P. S. P. J. T. (2021). *Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2017-2021*.
- BPS Yogyakarta. (2020). *Analisis ketimpangan pendapatan daerah istimewa yogyakarta 2020*. 115.
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.29>
- Fashuri, R., & Saputra, P. M. A. (2022). ANALISIS PENGARUH UPAH MINIMUM, KEMISKINAN, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (Studi Kasus di Kabupaten Kawasan Sleingkar Wilis Periode 2010-2019). *Journal of Development Economic and Social Studies (JDESS)*, 1(1), 148–160.
- Logaritma, S. (2020). PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA MENURUT LAPANGAN USAHA 2015-2019. In *BPS* (pp. XVIII–146).
- Mankiw, N. G. (2023). *Principles of Microeconomics : a Guided Tour* (Tenth Edit). Cengage 200 Pier 4 Boulevard Boston, MA 02210 USA.
- Nilasari, A., & Amelia, R. (2022). Pengaruh PDRB Per Kapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. <https://journal.inspirasi.or.id/index.php/nomicpedia>
- Sholikah, N. R., & Imaningsih, N. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2021. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 10(3), 247–253. <https://doi.org/10.26740/jupe.v10n3.p247-253>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEMISKINAN DI DKI JAKARTA. In *Journal of Applied Business and Economic* (Vol. 5, Issue 4).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *ECONOMIC DEVELOPMENT ECONOMIC (THIRTEENTH)*. PEARSON EDUCATION LIMITED.
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art9>
- Zulfariska, D., & Bariyah, N. (2021). Pengujian Teori Kurva U-Terbalik (Hipotesis Kuznets) di Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi: Kampus Merdeka Meningkatkan Kecerdasan Sumberdaya Manusia Melalui Interdisipliner Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi: Pontianak, 24 Agustus 2021*, 165–184. <https://doi.org/10.26418/pipt.2021.33>